

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di Kabupaten Sidoarjo

(Studi Kasus di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo)

Oleh: Khoirul Anam (202020100005)

Dosen Pembimbing :

Dr., Isnaini Rodiyah, M.Si

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Pendahuluan

Pelayanan pendidikan merupakan hak setiap individu yang diperoleh bagi warga negara Indonesia. Pada tahun 2013, Pemerintah Indonesia telah menerapkan program wajib belajar selama 12 tahun, 6 tahun untuk Sekolah Dasar, 3 tahun untuk Sekolah Menengah Pertama, dan 3 tahun untuk Sekolah Menengah Atas. Tujuan dari program ini untuk mencetak tenaga kerja yang profitabel dan bisa diandalkan dalam menjawab kebutuhan pasar akan SDM yang mumpuni dan memiliki kompetensi sehingga mampu bersaing di ekonomi global.

Program kebijakan sistem zonasi dalam PPDB memiliki jumlah Persentase penerimaan untuk setiap jenjangnya diantaranya: (1) Jalur zonasi, merupakan jalur yang ditujukan bagi calon siswa yang berada disekitar sekolah dengan presentase minimum 50%. (2) Jalur afirmasi, merupakan jalur yang dikhususkan untuk calon peserta didik dari keluarga yang kurang mampu dan penyandang kebutuhan khusus mendapatkan hak yang sama yaitu pelayanan pendidikan berkualitas, dengan presentase 15%.

Pendahuluan

(3) Jalur prestasi, jalur ini dibentuk dengan tujuan untuk membangun iklim kompetensi calon siswa dan meningkatkan prestasi calon siswa, Pemerintah Daerah bisa dapat membuka jalur prestasi bilamana masih ada sisa kuota. (4) Jalur mutasi, jalur ini ditujukan kepada calon siswa dimana pekerjaan orang tuanya dimutasi ke daerah tersebut dengan syarat menunjukkan pemindah tugas dari tempat kerja dengan presentase maksimum 5%.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Sidoarjo telah mencatat tiap tahunnya terjadi penurunan jumlah siswa yang mendaftar dan yang di terima pada sistem PPDB Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kabupaten Sidoarjo setelah menerapkan sistem ini pada 2019 lalu. Pada sistem ini banyak menerima siswa dengan jarak rumahnya yang paling dekat dengan sekolah, sehingga mengakibatkan siswa yang jarak antara rumah dan sekolahnya jauh tidak di terima di sekolah Negeri. Akhirnya mereka memutuskan sekolah di sekolah Swasta,

Pendahuluan

Adapun data siswa yang dinyatakan diterima dan yang tidak diterima di Kabupaten Sidoarjo dalam 5 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rekapitulasi data Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat SMP Kabupaten Sidoarjo

Tahun Ajaran	Jumlah Pendaftar	Jumlah yang Diterima	Jumlah yang Tidak Diterima
2019-2020	22.621	13.474	9.147
2020-2021	19.445	10.507	8.938
2021-2022	18.507	10.610	7.897
2022-2023	18.402	13.399	5.003
2023-2024	18.402	13.120	5.282

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo (2023)

Permasalahan yang ditemui :

Sesuai data tabel di atas, penerapan kebijakan PPDB tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo selama 5 (lima) periode ini masih memunculkan permasalahan terkait calon siswa yang tidak diterima, permasalahan tersebut muncul dikarenakan sebaran SMP negeri di Kabupaten Sidoarjo yang kurang merata. Hal tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi di Kecamatan Tulangan dan Kecamatan Prambon, dimana di kedua kecamatan tersebut jumlah SMP negeri masih terbatas sehingga calon siswa yang jarak rumahnya jauh dengan sekolah negeri tidak dapat masuk karena keberadaannya diluar radius zona yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, peraturan sistem zonasi dibuat dengan asumsi bahwa setiap satu kilo meter sudah ada sekolah, sedangkan fakta dilapangan masih jauh dari asumsi tersebut. Disisi lain wali murid dan siswa yang berprestasi merasa dirugikan, hal ini dikarenakan kebijakan ini mengutamakan zona tempat tinggal dibandingkan nilai ujian nasional. Sedangkan Kuota dari jalur prestasi yang lebih sedikit dari kuota zonasi juga menjadikan penyebab banyaknya siswa pendaftar yang tidak lolos di sekolah yang mereka idamkan.

Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh
Wijaya (2020)

menunjukkan bahwa terdapat hambatan dalam penerapan sistem zonasi yaitu terdapat kurang pemahaman yang dialami wali murid pada sistem pendidikan yang telah disampaikan oleh Dinas Pendidikan sehingga masih terjadi banyak kesalahan pada saat pemilihan sekolah dimana hal ini menyebabkan kesempatan yang dimiliki oleh calon murid untuk diterima di sekolah yang diinginkan menjadi kecil akibat adanya pembatasan kuota penerimaan.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh
Anggraeni et al (2022).

kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah dan pihak sekolah kepada masyarakat sehingga banyak wali murid yang masih belum begitu paham terkait kebijakan tersebut. Karena kurang mempertimbangkan pemetaan wilayah secara keseluruhan, kebijakan sistem zonasi PPDB ini menimbulkan adanya target intervensi serta standarisasi sekolah yang tidak jelas, sehingga terjadi ketidakselarasan antara petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dengan implementasi di lapangan

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh
(Novrijayanti et al., 2021).

kebijakan ini mengutamakan zona tempat tinggal dibandingkan nilai ujian nasional. Sedangkan Kuota dari jalur prestasi yang lebih sedikit dari kuota zonasi juga menjadikan penyebab banyaknya siswa pendaftar yang tidak lolos di sekolah yang mereka idamkan

Metode Penelitian



JENIS PENELITIAN

Deskriptif Kualitatif



SUMBER DATA

- ❖ Data Primer
- ❖ Data Sekunder



LOKASI PENELITIAN

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) dan SMP N 1 Tulangan Sidoarjo

Metode Penelitian

FOKUS PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis terfokus pada hal penting yang sudah didapat saat proses pengumpulan data dilapangan. Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan cara mendeskripsikan data-data yang telah diseleksi baik dalam bentuk narasi, bagan atau sejenisnya



TEKNIK PENENTUAN INFORMAN

Purposive Sampling



TEKNIK PENGUMPULAN DATA

- ❖ Observasi
- ❖ Wawancara



TEKNIK ANALISIS DATA :

Miles and Huberman

- ❖ Pengumpulan Data
- ❖ Reduksi Data
- ❖ Penyajian Data
- ❖ Penarikan Kesimpulan

Pembahasan

Penerimaan peserta didik baru di Dinas pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai dengan prinsipnya yaitu; Objektif, Transparan, Akuntabel, Non Diskriminatif. Keberhasilan ataupun kegagalan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat menurut Edward III diantaranya;

- **Komunikasi**, masih belum berjalan dengan maksimal “sehingga masih ada orang tua calon peserta didik yang salah menentukan zona” kasi pembinaan.
- **Sumberdaya**, tenaga pelaksana untuk menentukan zona masih bekerjasama dengan ITS. Faktor pendukungnya anggaran yang mencukupi.
- **Disposisi**, kurang meratanya sebaran sekolah SMP Negeri di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Faktor pendukungnya para pelaksana memiliki keinginan dan kecenderungan positif.
- **Struktur Birokrasi**, memiliki struktur birokrasi dan SOP.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Sidoarjo sudah diselenggarakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan teknis yang berlaku sesuai Permendikbud No. 01 Tahun 2021 maupun Perda (Peraturan Bupati Sidoarjo) No. 9 Tahun 2023 Pasal 13 ayat 2, yang secara jelas menjelaskan tentang pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB. Dalam sistem zonasi jalur penerimaan yang telah ditetapkan memberikan kesempatan yang sama kepada calon peserta didik. Hal tersebut diperjelas dengan 4 (empat) elemen unsur implementasi menurut George C. Edward III, antara lain komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam Komunikasi antara pihak eksternal (dinas, masyarakat, desa) dan internal (sekolah) dapat dilaksanakan secara bersinergi dan baik. Panitia pelaksanaan PPDB dan wali murid siswa yang mendaftar memperoleh informasi secara gamblang serta transparan melalui media masa dan langsung secara tatap muka. Sumberdaya implementor sudah cukup baik dalam melaksanakan kewenang sebagai panitia PPDB sesuai ketentuan yang telah berlaku. Disposisi sikap panitia PPDB telah patut dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya. Struktur birokrasi panitia PPDB di Kabupaten Sidoarjo dalam pembagian tanggung jawab sudah dengan baik dan profesional dengan kompetensi serta uraian tugas sesuai SOP yang berlaku. Dalam hal tersebut menjadikan evaluasi pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk penerapan PPDB kedepannya.

REFERENSI

- Anggraeni, A., Helpiastuti, S. B., & Wahono, P. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), 5234–5241.
- ANITA LIE. (2023). Orang Muda dan Meritokrasi. *MERITOKRASI*.
- Aplikasi, J. (2002). Public policy. *Presstime*, 24(11), 16.
- H Kara, O. A. M. A. (2014). Implementasi peraturan walikota nomor 12 tahun 2018 tentang tarif sewa Rusunawa di Penjaringansari tahap II dan III kota Surabaya. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Kemendikbud. (2021). Daftar Tanya Jawab Kebijakan Zonasi Tahun Ajaran 2020/2021. Kemendikbudristek.
- Mail, M. J., & Mail, M. D. (2022). Bahasa Daerah Dan Bahasa Indonesia; Nasionalisme Atau Fanatisme. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(1), 106–118. <https://doi.org/10.29103/jspm.v3i1.5987>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.) (3rd ed.). Sage Publications.
- Muzakkir, M., & Yunanda, R. (2021). Strategi Orang Tua Keluarga Miskin dalam Meningkatkan Pendidikan Anak. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 1(1).
- Novrijayanti, I., Astika, Y. W., Sari, M., & Jesika, S. (2021). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Melalui Sistem Zonasi Untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 71. <https://doi.org/10.56957/jsr.v4i2.161>
- Nst, W. R. (2021). Sosiologi Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dana Zakat. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 7(1), 31–40.
- Nurany, F. (2022). Penerapan Ppdb Online Sistem Zonasi Kota Surabaya Dalam Perspektif Good Governance. *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 12(2), 124–132. <https://doi.org/10.38156/gjkmp.v12i2.62>
- Oleh. (n.d.). Penerapan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Dan Mutu Pembelajaran Di Sekolah Menengah Pertama Kota Yogyakarta Implementation of the School Zoning System on New Student Admission (Ppdb) and Learning Quality in Junior High School At Yo. 398–405.

REFERENSI

- Plutzer, M. B. B. and E. (2021). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 6.
- Rahayu, R. M. L., Reza, R., & Ellyawati, N. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Di Smp Negeri 9 Samarinda Tahun Pembelajaran 2020/2021. Educational Studies: Conference Series, 1(2). <https://doi.org/10.30872/escs.v1i2.888>
- Reza, V., Snapp, P., Dalam, E., Di, I. M. A., Socialization, A., Cadger, O. F., To, M., Cadger, S., Programpadang, R., Hukum, F., Hatta, U. B. U. B., Sipil, F. T., Hatta, U. B. U. B., Danilo Gomes de Arruda, Bustamam, N., Suryani, S., Nasution, M. S., Prayitno, B., Rois, I., ... Rezekiana, L. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. Bussiness Law Binus, 7(2), 33–48.
- Rizki, T. M., & Ridwan, M. (2023). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Medan. Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan, 14(2), 205–220. <https://doi.org/10.23960/administratio.v14i2.408>
- Setiawati, N. D., & Rahaju, T. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Ppdb Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo. Publika, 609–620. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p609-620>
- Sidoarjo, D. I. K. (2024). Ppdb.
- Urrahmi, M., Putri, N. E., Pada, P., Kota, P., & Tahun, P. (2020). Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP). 2(2), 9–17.
- Zurriyati, Z., Perangin-angin, A. B., Effendi, F. E., & Tambunan, K. (2023). LANGUAGE ACQUISITION OF 4-5-YEAR-OLD TODDLERS: INDONESIAN AND ENGLISH IN THE COVID-19 ERA. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM), 4(1), 182–195.